

**DINAMIKA EKSISTENSI AGAMA PADA RUANG PUBLIK ERA
GLOBALISASI DI INDONESIA**
**The Dynamics of Religious Existence in the Public Sphere During the Era of
Globalization in Indonesia**

Syaripulloh^{1*)}, Farkhan Abdurochim Alfarauq²⁾, dan Sultan Tirta Mujtaba³⁾

^{1,2)}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Jl.Ir. H. Juanda No.95, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Indonesia

²⁾Lembaga Riset dan Inovasi Yayasan As-Syaeroji, Banjar, Jawa Barat, Indonesia

*Pos-el: syariplloh@uinjkt.ac.id (Corresponding Author)

Naskah diterima: 4 Juli 2025 - Revisi terakhir: 19 Desember 2025

Disetujui terbit: 20 Desember 2025 – Terbit: 26 Desember 2025

Abstract.

This study examines the dynamics of religion in the public space in Indonesia during the era of globalization. Using a qualitative approach with library research and content analysis, the study applies Peter Beyer's theory of globalization and religion to analyze the interaction between religious and global forces in Indonesia through four key dimensions: economic, political, cultural, and social systems. The findings reveal that although Indonesia is not a theocratic state, religion continues to play a significant role in both state affairs and the social life of modern Indonesian society. This research highlights how religion adapts and transforms in response to globalization, maintaining its public relevance despite predictions of secularization.

Keywords: Religion; Globalization; Indonesia; Public Space

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika eksistensi agama pada ruang publik era Globalisasi dalam konteks Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Teori globalisasi dan agama yang dibangun oleh Peter Beyer dapat digunakan untuk melihat fenomena agama dan globalisasi di Indonesia, setidaknya dapat dilihat melalui pendekatan ekonomi, politik, budaya, dan sistem sosial. Melalui library research dan content analysis peneliti akan mencari bagaimana dinamika agama dan globalisasi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia bukan merupakan negara yang berlandaskan agama. Akan tetapi agama memiliki peran dalam kehidupan negara dan sosial masyarakat modern Indonesia.

Kata kunci: Agama; Globalisasi; Indonesia, Ruang Publik

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi beragam dalam agama, suku, dan budaya. Agama utama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu hidup berdampingan. Pancasila menjadi dasar nilai yang mendasari nilai toleransi dan kerukunan. Keberagaman ini menimbulkan tantangan baru terkait masalah keagamaan terutama berkaitan dengan modernisasi. Pancasila menekankan pada nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai tersebut berarti Indonesia merupakan sebuah negara yang mengakui agama dalam kehidupan masyarakatnya dan menjadi unsur dalam negara itu sendiri.

Agama menjadi bagian negara Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi dasar bagi hukum dan penyelenggaraan negara secara penuh. Negara Indonesia tidak berdasarkan konservatif agama dalam penyelenggaraannya. Indonesia lebih diidentifikasi sebagai negara kesatuan berlandaskan Pancasila yang menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengakomodir semua unsur agama dalam satu wadah negara menjadikan Indonesia sebagai negara yang inklusif agama. Pada saat ini Indonesia mengakui setidaknya enam agama yang terdapat dan diakui eksistensinya oleh negara meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Utama 2019).

Selain enam agama yang diakui, sejatinya terdapat juga aliran kepercayaan atau penghayat yang keberadaannya belum diakui secara resmi oleh negara walaupun sudah ada sebelum masyarakat Indonesia mengenal konsep agama. Walaupun demikian, praktik kepercayaan tersebut tidak dilarang selama tidak berlawanan atau dianggap merusak konsep agama utama sebagai aliran sesat. Negara melindungi dan membebaskan warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Afandi 2009).

Perjalanan agama di Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan era dan jaman. Agama mempengaruhi struktur masyarakat Indonesia termasuk kebudayaan dan cara hidup. Seperti contohnya saat masa Hindu dan Buddha, Nusantara (sebutan Indonesia pada masa itu) berbentuk kerajaan yang bercorak agama dan pada masa itu banyak membangun candi sesuai agama Hindu dan Buddha yang mendapatkan pengaruh kebudayaan India yang menyatu dengan kearifan lokal masyarakat Nusantara yang awalnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.

Era selanjutnya agama Islam mulai masuk dan berkembang di Nusantara yang memberikan pengaruh bagi dinamika agama masyarakat. Muncul beberapa kerajaan bercorak Islam di Nusantara mempengaruhi cara hidup dan kebudayaan Nusantara. Akan tetapi, munculnya Islam pada masa itu tidak menghapus kebudayaan era Hindu dan Buddha secara menyeluruh. Islam menyesuaikan dengan kebudayaan yang sudah ada dan menjadikannya menjadi kebudayaan baru yang bernuansa Islam.

Pada era kolonialisme, agama Kristen dan Katholik mulai masuk ke Indonesia dibawa oleh Bangsa Belanda yang datang ke Hindia Belanda. Tentu semua ini memberikan dampak kepada dinamika agama Indonesia. Agama juga memberikan pengaruh signifikan pada masa modern di Indonesia. Tanpa kita sadari nilai dan norma agama yang ada memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Setidaknya dengan adanya agama memberikan sebuah pandangan masyarakat dalam bertindak dan meneguhkan identitas sosial.

Agama tidak mengalami proses sekularisasi seperti yang dikatakan para tokoh sekular. Walaupun ada penurunan peran agama kepada sains. Agama tetap hadir dan menjadi cara pandang masyarakat. Rasionalisasi pada era modern tidak menyingkirkan agama, pandangan Bryan Wilson tentang agama kehilangan fungsinya dalam mengatur moralitas dan perilaku sosial yang diambil alih oleh hukum dan nilai-nilai sekuler dan bertransformasi pada ranah privat sejatinya tidak relevan jika diimplementasikan pada masyarakat Indonesia. Dalam konteks dinamika agama Indonesia, Pandangan Casanova

lebih relevan. Agama akan menyesuaikan diri dengan keadaan modernisasi dan kembali memainkan peran dalam ruang publik (Martin, Casanova; dan Beyer 1996).

Sejalan dengan Casanova, pandangan tentang agama dan modernisasi dicetuskan oleh Peter Beyer. Pandangan Beyer tentang agama merupakan fenomena sosial yang terus berubah dan beradaptasi dalam konteks globalisasi dan modernitas. Rasionalisasi tidak sepenuhnya bertentangan dengan agama dan dapat digunakan sebagai unsur yang memperkuat agama. Sejatinya agama dan modernisasi dapat dilihat melalui empat pendekatan yaitu ekonomi, politik, budaya, dan sistem sosial (Beyer 2006). Merujuk pada pendekatan yang diadaptasi oleh Beyer dalam memahami agama dalam era globalisasi modern. Penulis akan mengkaji ulang terkait fenomena dinamika agama dan perannya pada masa modern dalam konteks Indonesia sebagai jawaban atas tidak relevannya konsep sekularisme.

Peter Beyer dalam karyanya yang berjudul *Religion and Globalization: Understanding the Issues* membahas hubungan antara agama dan globalisasi, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam konteks dunia modern. Beyer menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis peran agama dalam era globalisasi dan menyelidiki bagaimana globalisasi memengaruhi transformasi identitas, praktik, dan makna agama (Beyer 2006). Beyer menjelaskan bahwa globalisasi menciptakan dunia yang semakin saling terhubung secara ekonomi, politik, dan budaya. Proses ini memengaruhi agama dengan dua fungsi yaitu fungsi universalitas dan Partikularitas, dan fungsi integratif global.

Universalitas memiliki arti bahwa agama akan menyesuaikan diri dengan konteks global sedangkan partikularitas akan membawa agama sebagai media ekspresi dalam kebangkitan identitas lokal atau nasional. Fungsi integratif global berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan, menawarkan kerangka etika dan moral yang bersifat universal. Terdapat beberapa bentuk transformasi agama dalam globalisasi menurut Beyer. Pendekatan Globalisasi Agama (*Religion as Globalizing Force*) memiliki arti agama memiliki peran jaringan transnasional dan menjadi agen globalisasi. Kedua, Pendekatan Agama sebagai Respon terhadap Globalisasi (*Religion as a Response to Globalization*) yaitu agama merespon globalisasi yang dianggap mengikis nilai lokal sebagai upaya mempertahankan nilai religius. Yang ketiga, Pendekatan Agama dalam Ranah Privat (*Religion as Privatized*) yaitu agama tergeser ke ranah privat akibat globalisasi dan tidak menjadi kekuatan dominan dan tidak menjadi norma kolektif yang diikuti. Terakhir ialah pendekatan Agama sebagai Sumber Identitas Kolektif (*Religion as Identity Marker*) yaitu agama menjadi sumber identitas kolektif untuk menghadapi globalisasi.

Untuk memahami pendekatan tersebut, Beyer menawarkan 4 konsep pendekatan teoritis multidimensi yang dipinjam dari disiplin ilmu sosial lain untuk menjelaskan peran, fungsi, dan transformasi agama dalam masyarakat global. Konsep pertama melalui pendekatan ekonomi atau pasar global merujuk pada Beyer mengkaji teori pasar global oleh Werlestein. Dalam konsep ini agama diartikan sebagai pasar makna di mana agama

bersaing dengan ideologi lain untuk mendapatkan pengikut, legitimasi, dan pengaruh yang kemudian mengalami proses komersial atau komodifikasi.

Kedua, pendekatan politik. Beyer pada pendekatan ini mengkaji ulang pendapat John Meyer tentang pengaruh negara dan dikaitkan dengan agama. Agama sering memainkan peran ganda. Di satu sisi, agama menjadi alat legitimasi kekuasaan dan ideologi politik. Di sisi lain, agama dapat menjadi kekuatan oposisi terhadap negara atau sistem global yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini agama dapat masuk dalam negara dan isu-isu transnasional.

Ketiga, Pendekatan Budaya. Beyer mengkaji ulang pendapat Robertson tentang agama bersingungan dengan budaya yang memiliki kaitan erat. Dalam konteks globalisasi, agama tidak hanya dijalankan dalam bentuk ibadah, tetapi juga tampil sebagai gaya hidup, ekspresi seni, musik, dan bahkan mode. Agama dalam pendekatan ini merupakan konstruksi makna simbolis dari ekspresi identitas.

Keempat, Pendekatan Sosial. Beyer mengkaji terkait pendapat Niklas Luhmann dalam teori sistem sosial berkaitan dengan komunikasi. Agama dianggap sebagai kekuatan yang membentuk solidaritas sosial, jaringan komunitas, dan kohesi masyarakat. Dalam hal ini agama sebagai bagian dari sistem sosial (Beyer 2006).

METODE

Paper ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menari informasi mengenai dinamika agama pada era modern di Indonesia. Informasi dikumpulkan melalui bahan yang sifatnya pustaka seperti dokumen, buku, majalah, jurnal dan sebagainya (Assyakurrohim, Ikhram, Sirodj, dan Afgani 2022). Paper ini mencari jawaban terkait dinamika agama era modern di Indonesia. Studi *library research* dilakukan dengan cara analisis isi dokumen secara sistematik melalui bentuk komunikasi yang dituangkan tertulis secara obyektif (Sarwo 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika agama Indonesia pada era modern mencerminkan hubungan kompleks antara tradisi keagamaan, pluralisme, dan tantangan modernisasi. Sebagai negara dengan beragam terkait agama dan keyakinan, Indonesia berupaya mempertahankan harmoni sosial melalui prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Agama dalam hal ini bukan hanya sebagai ranah privat akan tetapi mempunyai peran pada ranah publik. Indonesia sebagai negara mempunyai lembaga tingkat kementerian yang khusus mengurus bidang agama yang didirikan pada 3 Januari 1946 (Masykur 2018).

Kementerian agama sejatinya sudah hadir semenjak negara Indonesia merdeka. Pada awalnya, diusulkan sebuah lembaga setingkat kementerian yang khusus untuk membidangi urusan agama pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh Muh Yamin. Kelanjutan pembentukan lembaga agama pada bidang urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran ini berlanjut pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Kemenag 2023).

Konsep kementerian bidang agama ini pada awalnya ditolak oleh sidang PPKI terutama oleh para pihak yang beranggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari negara. Pada lain sisi, hal ini mengakibatkan bertambahnya kekecewaan pada tokoh Muslim setelah dihapuskannya tujuh kata pada Piagam Jakarta. Para petinggi negara pada saat itu amat berpegang teguh pada nilai sekularisme dalam menjalankan negara walaupun pada praktiknya sangat berlainan. Hal tersebut membuat urusan negara tercampur dengan agama tidak sejalan dengan kemauan para petinggi. Untuk mengatasi hal tersebut dibentuklah Kementerian Agama sebagai jalan Tengah untuk memisahkan hal tersebut (Kemenag 2023).

Awalnya agama ingin dibatasi dalam ranah privat dengan membatasi nilai dan norma agama yang muncul pada rancangan negara. Akan tetapi sesungguhnya agama tetap muncul pada ranah publik dan mempengaruhi rancangan kebijakan pada saat itu. Hal ini memunculkan dualitas sistem yaitu sistem sekular dan sistem agama. Agama diberikan wadah untuk aktualisasi dalam institusi lewat kementerian agama untuk mengatasi dualitas sistem yang muncul. Pada konteks Indonesia, yang terjadi bukanlah kurangnya peran agama. Agama tetap muncul sebagai unsur yang mempengaruhi kebijakan negara.

Secara sistem, negara Indonesia bukanlah negara berlandaskan agama. Akan tetapi dalam merumuskan kebijakan dan landasan negara, agama berperan dan ikut serta mempengaruhi dinamika negara. Setidaknya dapat kita lihat melalui beberapa aspek bagaimana agama berperan terhadap kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia.

Dinamika Agama dalam Ekonomi Indonesia

Pendekatan globalisasi dalam bidang ekonomi terhadap agama merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh Beyer untuk mengetahui bagaimana peran agama dalam globalisasi (Beyer 1994). Dalam hal ini, agama dianggap mendukung apabila dapat beradaptasi dengan sistem kapitalisme. Seperti yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Weber dalam The Protestant Ethic and Spirit Capitalism dimana agama Protestan aliran Calvinism memiliki peran dalam mendorong semangat kapitalisme lewat rasionalisasi nilai (Weber 2002).

Hal serupa juga terjadi dalam konteks Indonesia dimana dibuktikan dengan munculnya organisasi modernis seperti Muhammadiyah yang membawa konsep rasionalisasi konsep agama Islam melalui birokrasi modern (Mulyadi 2006). Lewat rasionalisasi nilai yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan, organisasi Islam modernis tersebut berhasil membangun bisnis kemanusiaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Agama berperan sebagai pendorong sukses dalam bidang ekonomi dalam konteks ini.

Selain itu banyak produk kapitalisme pada era modern yang berorientasi kepada ritual agama. Serupa oleh yang dikatakan oleh Bryan Turner bahwa agama dikomodifikasi dalam ekonomi global, misalnya melalui produk-produk spiritual, wisata religi, dan industri agama lainnya (Turner 2011). Seperti contohnya duka dalam tradisi ziarah, duka merupakan produk komodifikasi agama. Sejatinya duka adalah sesuatu yang

profan jika tidak disentuh dengan ritual. Akan tetapi interaksi dengan ritual membuat dupa berubah menjadi sesuatu yang sakral dan menciptakan makna-makna tertentu yang didukung oleh doktrin agama. Dupa dianggap sebagai pelantara antara hamba dan tuhan agar doa tembus ke langit ke 7 (Syaripulloh, Tanggok, Sulistiono, dan Alfarauq 2024).

Munculnya produk berbasis agama merupakan bentuk transformasi nilai agama menjadi produk komodifikasi ekonomi. Di era modern ini, masyarakat Indonesia sering amat tertarik terhadap produk berbasis agama. Fenomena ini menciptakan *Islamic consumption trend* pada masyarakat kelas menengah perkotaan Indonesia. Religiusitas dikedepankan oleh sebuah *brand* atau produk kapitalisme dengan memberikan label agama pada produk mereka (Asmaul Husna, 2018). Dengan mengkonsumsi produk Islami para memberikan rasa meningkatnya religiusitas bagi pemakai akibat konstruksi yang dibangun oleh kapitalisme. Lewat pendekatan ekonomi dapat diketahui bahwa agama tetap memiliki peran dalam keputusan berkaitan dengan ekonomi. Agama tidak tersingkirkan dimana masyarakat mempertimbangkan aspek agama dalam perilaku dan pengambilan keputusan ekonomi.

Dinamika Agama dalam Politik Indonesia

Serupa dengan pendekatan ekonomi, agama juga menjadi unsur penting dalam ranah politik Indonesia sebagai unsur yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Seperti yang sudah diketahui, saat ini elemen partai politik Indonesia terbagi atas kaum nasionalis dan agamis. Kedua unsur tersebut bertahan cukup lama dalam dunia politik Indonesia dan sudah hadir semenjak negara Indonesia terbentuk. Dalam hal ini, Beyer meminjam konsep John Meyer untuk menjelaskan pendekatan politik dan agama yang menekankan pengaruh agama dan keterlibatan negara (Martin, Casanova; dan Beyer 1996).

Agama bertindak sebagai identitas politik yang mempengaruhi peta kekuatan kekuasaan. Akan tetapi keterlibatan agama dalam politik banyak disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sifat agama yang memiliki memiliki nilai kebenaran tunggal dan doktrinasi dimanfaatkan sebagai senjata untuk melemahkan lawan politik yang berasal dari indentitas keagamaan yang berbeda dan menciptakan polarisasi. Simbol agama dijadikan sebagai kekuatan politik identitas, Seperti contohnya dalam kasus Indonesia imbas polarisasi politik yang kuat pada Pilpres 2019 dan pilkada Jakarta 2017 menciptakan moralitas simbolik tentang nilai Islam (Makhsin, 2021).

Deprivatisasi agama terjadi dalam kasus ini yaitu yang semula agama dipaksa untuk berada dalam ranah privat menjadi kembali berada di ranah publik. Agama dijadikan sebagai alat untuk mobilisasi masa dalam jumlah besar yang ditujukan untuk mendukung salah satu paslon yang memiliki kesamaan identitas keagamaan. Agama ditekankan pada politik identitas sebagai kebenaran tunggal mengabaikan pandangan lain yang tidak sependapat.

Politik agama cenderung bersifat ekslusif untuk mempengaruhi kebijakan negara (Aidah, Rochmadian, dan Maliha 2023). Pada beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah berbasis agama. Implementasi Perda Syariah di beberapa wilayah Indonesia mengatur norma-norma berbasis hukum Islam, seperti larangan alkohol atau

kewajiban berpakaian sesuai syariat Islam. Tentu konsep perda tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai pluralism karena bersifat ekslusif. Perda ini sering digunakan sebagai kontrak politik untuk memenangkan dukungan masyarakat yang muncul sebagai respons terhadap krisis kepercayaan pada pemerintah (Abrori 2016).

Dinamika Agama dalam Budaya Indonesia

Pendekatan ini melihat bagaimana globalisasi menciptakan homogenisasi budaya, tetapi pada saat yang sama mendorong revitalisasi identitas agama sebagai bentuk resistensi (Beyer, 2006). Agama pada kasus budaya di Indonesia mengalami banyak dinamika. Pada awalnya agama dan budaya di Indonesia merupakan entitas yang terpisah dan mempunyai sisi berlawanan. Akan tetapi dalam perkembangan persebaran agama Islam, nilai budaya dan agama dapat berbaur dalam sebuah praktik ritual. Pelopor dari hal ini adalah *Walisongo* (Wali Sembilan) yang berhasil menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa.

Agama berhasil menyebar melalui Budaya Jawa dan menciptakan tradisi seperti *slametan*. Masyarakat Jawa sebelum Islam melakukan *slametan* yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Setelah Islam datang, kegiatan tersebut diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Unsur-unsur Islam seperti doa dalam bahasa Arab, pembacaan Al-Qur'an, dan zikir menggantikan mantra-mantra Hindu-Buddha. Geertz membagi jenis masyarakat Jawa dalam tiga kelompok yaitu abangan, priyayi, dan santri. Setiap jenis kelompok tersebut memiliki cara masing-masing untuk implementasi budaya keagamaan (Geertz, 2014).

Agama juga mengalami perkembangan kembali dalam budaya masyarakat modern. Pada masa ini agama beradaptasi melalui media sosial elektronik. Globalisasi membuat agama beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Akibatnya, muncul sebuah trend baru bagi kalangan milenial terkait belajar agama lewat media sosial. Trend ini membawa kekhawatiran bagi kalangan tradisionalis yang menganggap cara ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan miskonsepsi agama yang dipahami akibat pembelajaran secara otodidak yang tidak memiliki sanad (Azkia Falsa Annaba & Soleh, 2022).

Berbeda dengan kalangan tradisionalis. Sebaliknya kaum reformis Islam seperti salafi wahabi menggunakan media sosial sebagai alat dakwah mereka. Dengan media sosial, ajaran dakwah mereka terkait pemberantasan bi'dah, kesesatan, kebatilan, dan penghapusan praktik budaya yang tercampur agama dapat tersebar secara efektif kepada kalangan luas (Al-Hakim, 2021). Pada aliran ini sanad secara keguruan tidaklah penting karena mereka mengharamkan *taklid* (mengikuti pendapat) dan menganggap semua ajaran agama Islam harus bersumber dari al-Quran dan Hadist yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

Agama pada kedua kasus diatas berperan dalam kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, agama melakukan adaptasi terhadap praktik budaya akan tetapi berhati-hari dalam menerima globalisasi. Sedangkan kasus kedua, agama berperan sebagai agen untuk

revitalisasi identitas beradaptasi dengan globalisasi menciptakan resistensi terhadap praktik budaya.

Dinamika Agama dalam Sistem Sosial Indonesia

Agama dalam pendekatan ini dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terhubung dalam dunia yang semakin kompleks. agama tidak lagi memegang kendali langsung atas seluruh aspek kehidupan seperti pada masa tradisional. Agama dipandang sebagai subsistem yang berfokus pada fungsi spesifik, yaitu memberikan makna eksistensial, spiritualitas, dan legitimasi moral bagi individu dan masyarakat (Martin, Casanova; dan Beyer 1996).

Pendekatan ini didasarkan pada teori sistem sosial Niklas Luhmann, yang memandang masyarakat sebagai jaringan subsistem yang saling berinteraksi tetapi memiliki logika dan fungsi masing-masing (Beyer 1994). Agama dianggap memiliki peran dalam kehidupan masyarakat modern akan tetapi tidak secara langsung sebagai norma yang diterapkan.

Sebagai contohnya pada kasus negara Indonesia, agama bukan menjadi dasar negara akan tetapi dalam pelaksanaannya agama menjadi orientasi bagi penyusunan kebijakan negara. Serupa halnya dalam masyarakat, agama menjadi unsur yang tidak terpisahkan. Institusi sosial dan organisasi berbasis agama masih memiliki otoritas kuat dalam masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap penentuan kebijakan negara. Bahkan dalam kasus kebijakan negara, organisasi keagamaan kerap kali melahirkan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan pertimbangan politik dan kepentingan kelompok (Mietzner dan Muhtadi 2020).

Serupa halnya dengan kebijakan negara, agama juga masih memiliki peran cukup besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Sekolah berbasis agama banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan memiliki *prestise* tinggi di beberapa kalangan. Pemilihan sekolah agama sangat erat kaitannya dengan kualitas sekolah dan anggapan bahwa sekolah berbasis agama memiliki kelebihan dari sisi religiusitas dan orang tua berharap anaknya dapat menjadi pribadi yang dapat taat agama atau mempunyai sisi religiusitas yang baik (Abidin, Mustika, dan Mony 2023). Pada kasus ini, agama berperan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia dan mendapatkan *prestise* atau pandangan bahwa agama akan membawa hal yang baik bagi masyarakat.

SIMPULAN

Agama merupakan unsur yang tidak pernah akan hilang dalam masyarakat. walaupun Indonesia bukan merupakan negara yang berlandaskan agama. Akan tetapi agama memiliki peran dalam kehidupan negara dan sosial masyarakat modern Indonesia. Agama akan menyesuaikan bentuk atau bertransformasi sesuai perkembangan jaman akibat globalisasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat terlihat jelas melalui ekonomi, politik, budaya, dan sistem sosial. Tulisan ini terbatas hanya memaparkan bagaimana relevansi teori Peter Beyer pada fenomena agama di ruang publik Indonesia, diharapkan

penelitian selanjutnya dapat mengungkap bentuk dan kasus berdasarkan studi kasus atau data lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Rahmat; Andi Mustika Abidin; dan Nadila Sakina Mony. 2023. "Motivasi Intrinsik Orang Tua Memilih Sekolah Berbasis Agama di MTS Nurul Tsaqalain Kabupaten Maluku Tengah." *AN-NISA* 16 (2): 84–90. <https://doi.org/10.30863/an.v16i2.5344>.
- Abrori, Ahmad. 2016. "Refleksi teori kritis Jurgen Habermas atas konsesus simbolik Perda Syariah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16(1): 71–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2897>.
- Afandi, Fachrizal. 2009. "PAKEM: Salah satu upaya negara dalam melindungi agama, dalam Al-Qanun." *Arena Hukum* 12(2).
- Aidah, Nur Lailatul; Sindy Rochmadian; dan Usna Maliha. 2023. "Politik Identitas dalam Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3 (1): 1–20.
- Al-Hakim, Lukman. 2021. "Framing dakwah salafi Rodja TV di media sosial youtube." *Islamic Communication Journal* 6(2): 177–190. <https://doi.org/10.21580/icj.2021.6.2.9356>.
- Annaba, Azkia Falsa, dan K. Soleh. 2022. "Edukasi digital: Pembelajaran ilmu agama Islam melalui kanal Youtube dalam pandangan tradisi ilmu sanad." *Islamic Journal of Education* 1(2): 73–85. <https://doi.org/10.54801/ijed.v1i2.132>.
- Assyakurrohim, Dimas; Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj; dan Muhammad Win Afgani. 2022. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3 (1): 1–9.
- Beyer, Peter. 1994. *Religion and Globalization*. London: SAGE Publications.
- Beyer, Peter. 2006. *Religions in Global Society*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203087879>.
- Geertz, Clifford. 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Husna, Asmaul. 2018. "Komodifikasi agama: Pergeseran praktik bisnis dan kemunculan kelas menengah Muslim." *Jurnal Komunikasi Global* 2: 227–239.
- Kemenag. 2023. *Sejarah Kementerian Agama*. Diakses 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Makhasin, Lukman. 2021. "Islamisme dan Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Problema dan Tantangan ke Depan." In *Demokrasi Tanpa Demos*, edited by Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman, 31–41. Jakarta: LP3ES.
- Martin, David; Jose Casanova; dan Peter Beyer. 1996. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Masykur, M. R. 2018. "Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia." *Jurnal Al-Makrifat* 3(2): 31–45

- Mietzner, Marcus, dan Burhanuddin Muhtadi. 2020. "The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 42(1): 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1c>.
- Mulyadi, S. 2006. "Max Weber's remarks on Islam: The Protestant ethic among Muslim puritans." *Islam and Christian-Muslim Relations* 17(2): 195–205. <https://doi.org/10.1080/09596410600604484>.
- Sarwo, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaripulloh, Tanggok, I. Sulistiono, dan F. A. Alfarauq. 2024. "Makna dupa dalam tradisi ziarah makam Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat." *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi* 13(2): 200–210. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2024.3587>.
- Turner, Bryan S. 2011. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation and the State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Utama, A. S. T. 2019. "Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Civitas* 2(1): 29–41.
- Weber, Max. 2002. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London: Penguin Classics.